

PENGARUH IPM DAN PMDN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Ni Putu Sri Puspita Yanthi¹
I Ketut Sutrisna²

^{1,2}Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: puspitayanthi@gmail.com/ Telp: 085737677969

ABSTRAK

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang hanya berpusat pada satu daerah akan menciptakan ketimpangan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh IPM dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan (3) menganalisis pengaruh tidak langsung IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan jumlah pengamatan 45 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan (3) IPM tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi dan PMDN tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: IPM, PMDN, Pertumbuhan EKonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan

ABSTRACT

Each region has a different style of economic growth between regions. Economic growth that is only centered on one region will create inequality so that people are more prosperous in areas. The objectives of this study are (1) analyze the effect of IPM and PMDN on economic growth in Bali, (2) analyze the effect of IPM, PMDN and economic growth on the imbalance income distribution in Bali, and (3) analyze the indirect effect of IPM, domestic investment and economic growth on the unequal distribution of income through economic growth in Bali. The data used are secondary data, with 45 observations. The analysis technique used is path analysis. The results showed that (1) IPM had a positive and significant effect on economic growth in Bali, (2) IPM had a negative and significant effect on distribution inequality income in Bali, PMDN has a positive and significant effect on inequality of regency / city income distribution in Bali Province, and (3) IPM has no effect indirectly to the unequal distribution of income through economic growth and PMDN does not affect indirectly to the unequal distribution of income through economic growth.

Keywords: IPM, PMDN, Economic Growth, Inequality of Income Distribution

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin berhasil daerah tersebut melakukan strategi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi memiliki tiga komponen yaitu: (1) akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, sumber daya manusia melalui perbaikan dibidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja (3) kemajuan teknologi atau cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemerintah melalui perencanaan pembangunan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Todaro, 2006:118). Komponen komponen tersebut akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat.

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan perbedaan pendapatan antar masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Adanya hambatan untuk mengakses kehidupan yang lebih layak dan tidak memperoleh kesempatan sama dengan kelompok lain merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan (Dao, 2013). Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Setiap kabupaten/kota mencoba mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan melibatkan peran aktif semua masyarakat dengan tujuan akhir untuk mencapai pemerataan distribusi pendapatan (Antonescu, 2010).

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerahnya. Hal ini terlihat dengan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antara wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju atau daerah terbelakang (Gebbert *et al.*, 2005). Pertumbuhan ekonomi yang hanya berpusat pada satu daerah akan menciptakan ketimpangan sehingga masyarakat lebih sejahtera pada daerah yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi, namun daerah yang bukan menjadi pusat perekonomian akan merasakan kurangnya kesejahteraan di masyarakat karena menyumbangkan pendapatan yang relatif rendah (Yuliani, 2015). Provinsi Bali memiliki delapan kabupaten dan satu kota dengan potensi daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah mengalami ketimpangan pendapatan yang berbeda-beda (Gama, 2009), hal ini dikarenakan rendahnya pembangunan manusia, tidak meratanya investasi dan tingginya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Peningkatan sumber daya bersama dengan alokasi sumber daya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas akan mendorong pembangunan manusia yang lebih baik (Hanushek, 2013).

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah, karena ketimpangan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah (Yasa dan Arka, 2015). Ketimpangan distribusi pendapatan diukur menggunakan Indeks Gini yang diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (ketidakmerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana kurva Lorenz itu berada.

Indeks Gini adalah ukuran agregat dari distribusi pendapatan dan karena itu tidak terlalu informatif tentang arah perubahan distribusi. Indeks Gini atau *gini ratio* mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila *gini ratio* mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila *gini ratio* mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi, jika $G < 0,3$ artinya ketimpangan rendah, $0,3 \leq G \leq 0,5$ artinya ketimpangan sedang dan $G > 0,5$ artinya ketimpangan tinggi. Untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali, dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1 *Gini Ratio* Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2018 (dalam point)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
Jembrana	0.36	0.32	0.33
Tabanan	0.34	0.31	0.32
Badung	0.32	0.32	0.34
Gianyar	0.3	0.27	0.31
Klungkung	0.36	0.37	0.39
Bangli	0.35	0.3	0.31
Karangasem	0.29	0.32	0.34
Buleleng	0.34	0.31	0.34
Denpasar	0.33	0.34	0.34
Provinsi Bali	0.37	0.38	0.38

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019*

Berdasarkan Tabel 1.1 angka *gini ratio* kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menggambarkan adanya ketimpangan antar kabupaten di Provinsi Bali. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa *gini ratio* di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 0,01 point sedangkan dari tahun 2017 ke tahun 2018 tidak terjadi peningkatan. Kabupaten di Provinsi Bali yang mengalami peningkatan *gini ratio* setiap tahun adalah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem, kabupaten lain menunjukkan adanya fluktuasi dalam *gini ratio*. Peningkatan yang terbesar terjadi di Kabupaten

Klungkung pada tahun 2018 dengan tingkat ketimpangan 0,39 point. Tabel 1.1 ini dapat mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Bali masih mengalami ketimpangan distribusi pendapatan tingkat sedang.

Ketimpangan antar daerah adalah suatu hal yang dapat terjadi dalam kegiatan perekonomian. Ketimpangan yang terjadi dapat disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia serta perbedaan investasi masing-masing daerah. Adanya perbedaan tersebut, maka kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi di daerahnya juga berbeda. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dirasakan oleh seluruh wilayah di kabupaten/kota, karena pertumbuhan ekonomi dapat mempersempit ketimpangan pendapatan antar daerah (Mukhlis *et al.*, 2017). Pembangunan manusia juga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Brata, 2004).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat dapat bertambah dan kemakmuran masyarakat akan meningkat (Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian dapat menghasilkan penerimaan atau pendapatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat diharapkan juga akan meningkat.

Ketimpangan kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Ketimpangan tersebut terjadi karena sektor-sektor utama daerah hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja (Soenandar, 2005). Kurangnya keterkaitan antar daerah juga dapat menyebabkan terhambatnya proses penyebaran pembangunan yang akan berdampak pada besarnya kesenjangan atau ketimpangan yang terjadi. Pembangunan yang selama ini telah menghasilkan pertumbuhan yang cukup tinggi ternyata belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan atau berbagai golongan penduduk dengan kata lain belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan ketimpangan antar daerah (Kurniasih, 2013).

Perkembangan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan diikuti oleh distribusi penghasilan merata. Pertumbuhan ekonomi yang merata adalah dua dari lima tujuan utama suatu daerah (Niyimbanira, 2017), dimana pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi di daerah harus dicapai secara bersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan distribusi antar daerah (Pradana dan Sumarsono, 2018).

Pertumbuhan ekonomi sebagian besar dicapai melalui sumber daya manusia yang berkualitas dan penanaman modal dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tidak diikuti peningkatan kesempatan kerja akan menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar daerah (Rimbawan, 2012). Keberhasilan suatu daerah menempatkan manusia sebagai sumber daya berupa tenaga kerja yang dikatakan berhasil apabila diikuti dengan peningkatan

partisipasi penduduk dalam pembangunan daerah. *United Nations Development Program* (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang disebut *Human Development Indeks* atau indeks pembangunan manusia yang mengartikan definisi kesejahteraan secara lebih luas (Khodabakhshi, 2011). Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: 1) lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, 2) pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, 3) standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli.

Tinggi atau rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Penghasilan perkapita, pendidikan dan kesehatan merupakan tiga komponen utama indeks pembangunan manusia (Sudarlana, 2015).

Pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan biaya. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia (Ndakularak

dkk., 2014), dengan cara meningkatkan kualitas program di bidang kesehatan, gizi, pendidikan, dan pelatihan yang konsisten akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mempersempit ketimpangan (Boediono, 2017). Permasalahan yang terjadi dimana indeks pembangunan manusia pada setiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan indeks pembangunan manusia salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar daerah. Perbedaan ini dapat menjadikan Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan atau ketidakmerataan investasi juga berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ketimpangan semakin parah apabila tidak efisiennya pemerataan daerah seperti investasi yang terpusat (Piotr, 2009). Menurut Hirschman perbedaan karakteristik alam, sosial, dan ekonomi di setiap daerah juga menjadi penyebab terjadinya ketimpangan investasi (Yeniwati, 2013), karena perbedaan tersebut menjadi hambatan para investor dalam memilih wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan. Apabila pemerintah daerah berhasil menarik investor maka berdampak pada penyerapan lapangan kerja sehingga menciptakan kesejahteraan (Danawati, 2016).

Investasi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu daerah karena investasi berperan sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi. Investasi yang merata akan meningkatkan kegiatan perekonomian, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Investasi juga dapat menambah akumulasi modal domestik yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila

sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan. Melalui peningkatan kegiatan investasi dalam bentuk akumulasi kapital domestik akan menjadi faktor pengungkit yang sangat dibutuhkan suatu daerah dalam menggerakkan mesin ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi (Wiagustini dkk., 2017).

Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk mencari keuntungan, namun untuk kelancaran roda ekonomi masyarakat. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah merupakan daya tarik bagi investor (Kusuma, 2016). Investasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, sedangkan faktor non ekonomi seperti keadaan sosial, budaya, fasilitas-fasilitas pendukung di masing-masing daerah, yang mana investor akan memilih daerah yang berpotensi serta menguntungkan untuk dikembangkan (Sarungu dan Endah K, 2013).

Salah satu investasi yang diharapkan dalam percepatan pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Sarwendi, 2002). Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal di dalam negeri yang dilakukan oleh investor dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu daerah yang dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya. Tidak meratanya realisasi

penanaman modal dalam negeri menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

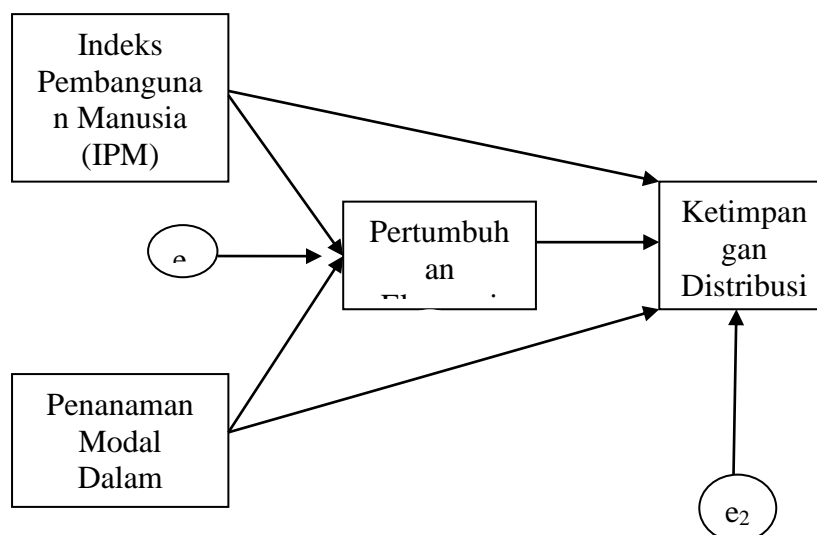
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis pengaruh IPM dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) untuk menganalisis pengaruh IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan (3) untuk menganalisis pengaruh tidak langsung IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Bali yang dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Software* yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS dalam mengukur pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Objek dari penelitian ini memfokuskan kajian pada empat variabel utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di

Provinsi Bali, menggunakan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan, dan variabel bebas (*independent variable*) yaitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah observasi yaitu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan dari penelitian yang dibuat. Dalam metode ini peneliti tidak langsung terlibat dan hanya sebagai pengamat yang independen (Sugiyono, 2013:204). Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan *path analysis* atau analisis jalur. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengaruh IPM dan PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat dua hubungan substruktural yang menyatakan hubungan kausal dari X_1 , X_2 , ke Y_1 serta hubungan kedua, substruktural yang menyatakan hubungan kausal dari X_1 , X_2 , Y_1 ke Y_2 . Anak panah e_1 variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) menunjukkan jumlah varian variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) yang dijelaskan oleh indeks pembangunan manusia (X_1) dan penanaman modal dalam negeri (X_2), sehingga terdapat dua persamaan struktural yaitu:

Persamaan Substruktural I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots \dots \dots (3.1)$$

Persamaan Substruktural II

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan:

- Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi
- Y_2 = Ketimpangan Distribusi Pendapatan
- X_1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- X_2 = Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- e_1, e_2 = Nilai kekeliruan standar
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien dari masing-masing variabel

Pengujian Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening dengan Uji Sobel

1) Pengaruh tidak langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y_2) melalui variabel intervening Pertumbuhan Ekonomi (Y_1). Menggunakan statistik uji yaitu:

$$S_{\beta_1 \beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1^2} + \beta_1^2 S_{\beta_5^2}} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- $S_{\beta_1 \beta_5}$ = besarnya standar *error* tidak langsung
- S_{β_1} = standar *error* koefisien β_1
- S_{β_5} = standar *error* koefisien β_5

β_1 = koefisien jalur dari X_1 terhadap Y_1
 β_5 = koefisien jalur dari Y_1 terhadap Y_2
 $\beta_1\beta_5$ = koefisien jalur X_1 terhadap Y_1 (β_1) dengan jalur Y_1 terhadap Y_2 (β_5)

untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut.

$$Z = \frac{\beta_1\beta_5}{s\beta_1\beta_5} \dots\dots\dots (3)$$

2) Pengaruh tidak langsung Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (X_2) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y_2) melalui variabel intervening pertumbuhan ekonomi (Y_1). Menggunakan statistik uji yaitu:

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2^2} + \beta_2^2 S_{\beta_5^2}} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

$S_{\beta_2\beta_5}$ = besarnya standar *error* tidak langsung
 S_{β_2} = standar *error* koefisien β_2
 S_{β_5} = standar *error* koefisien β_5
 β_2 = koefisien jalur dari X_2 terhadap Y_1
 β_5 = koefisien jalur dari Y_1 terhadap Y_2
 $\beta_2\beta_5$ = koefisien jalur X_2 terhadap Y_1 (β_2) dengan jalur Y_1 terhadap Y_2 (β_5)

untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut.

$$Z = \frac{\beta_1\beta_5}{s\beta_1\beta_5} \dots\dots\dots (5)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017: 232). Hasil statistik deskriptif dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Hasil Statistik Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPM	45	64.01	83.30	72.7300	5.53786
PMDN	45	525	10000000	1315762.20	1994660.012
L.Pertumbuhan Ekonomi	45	5.08	7.00	6.0382	.48693
Gini Ratio	45	.27	.40	.3384	.02977
Valid N (listwise)	45				

Sumber: *Lampiran 2*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa variabel IPM (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 64,01 point dan nilai maximum sebesar 83,30 point dengan rata-rata 72,7300 point dan standar deviasi sebesar 5,53786 point. Variabel PMDN (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 525 juta rupiah dan nilai maximum sebesar 10000000 juta rupiah dengan rata-rata 1315762,20 juta rupiah dan standar deviasi sebesar 1994660,012 juta rupiah. Variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) memiliki nilai minimum sebesar 5,08 persen dan nilai maximum sebesar 7,00 persen dengan rata-rata 6,0382 persen dan standar deviasi sebesar 0,48693 persen. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Y_2) memiliki nilai minimum sebesar 0,27 point dan nilai maximum sebesar 0,40 point dengan rata-rata 0,3384 point dan standar deviasi sebesar 0,02977 point.

1) Pengaruh IPM dan PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Pengujian hubungan substruktural I dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel IPM dan PMDN terhadap pertumbuhan

ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$\hat{Y}_1 = 0,573X_1 - 0,262X_2$$

$$S_b = (0,013) \quad (0,000) \quad R^2 = 0,253$$

$$t = (3,773) \quad (-1,725) \quad F = 7,121$$

$$\text{sig} = (0,001) \quad (0,092)$$

$$F_{\text{tabel}} = (k-1): (n-k)$$

Keterangan:

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel penelitian

$$F_{\text{tabel}} = (k-1): (n-k)$$

$$F_{\text{tabel}} = (2-1): (45-2)$$

$$F_{\text{tabel}} = 1: 43$$

$$F_{\text{tabel}} = 5,394$$

Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural I

Tabel 1.3 Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural I

Regresi	Koef. Reg Standar	t hitung	P. Value/ sig.	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,573	3,773	0,001	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	-0,262	-1,725	0,092	Tidak Signifikan

Keterangan:

X_1 = IPM

X_2 = PMDN

Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan persamaan regresi struktural I, F_{hitung} menunjukkan angka sebesar 6,516 dengan F_{tabel} sebesar 5,394. $F_{\text{hitung}} 6,516 > F_{\text{tabel}} 5,394$, artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi sudah layak (*fit*).

2) Pengaruh IPM, PMDN dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pengujian hubungan substruktural II dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$\hat{Y}_2 = -0,495X_1 + 0,353X_2 + 0,599Y_1$$

$$Sb = (0,001) \quad (0,000) \quad (0,009) \quad R^2 = 0,301$$

$$t = (-2,875) \quad (2,294) \quad (3,963) \quad F = 5,880$$

$$sig = (0,006) \quad (0,027) \quad (0,000)$$

$$F_{tabel} = (k-1): (n-k)$$

Keterangan:

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel penelitian

$$F_{tabel} = (k-1): (n-k)$$

$$F_{tabel} = (2-1): (45-2)$$

$$F_{tabel} = 1: 43$$

$$F_{tabel} = 5,394$$

Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural II

Tabel 1.4 Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural II

Regresi	Koef. Reg. Standar	t hitung	P. Value/sig	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_2$	-0,495	-2,875	0,006	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,353	2,294	0,027	Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,599	3,963	0,000	Signifikan

Sumber: *Lampiran 4*

Keterangan:

X_1 = IPM

X_2 = PMDN

Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi

Y_2 = Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan persamaan regresi struktural II, F_{hitung} menunjukkan angka sebesar 5,655 dengan F_{tabel} sebesar 5,394. $F_{hitung} 5,655 > F_{tabel} 5,394$, artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel IPM, PMDN, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan sudah layak (*fit*).

Mengetahui nilai e_1 yang menunjukkan jumlah variance variabel Pertumbuhan Ekonomi yang tidak dijelaskan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dihitung menggunakan rumus:

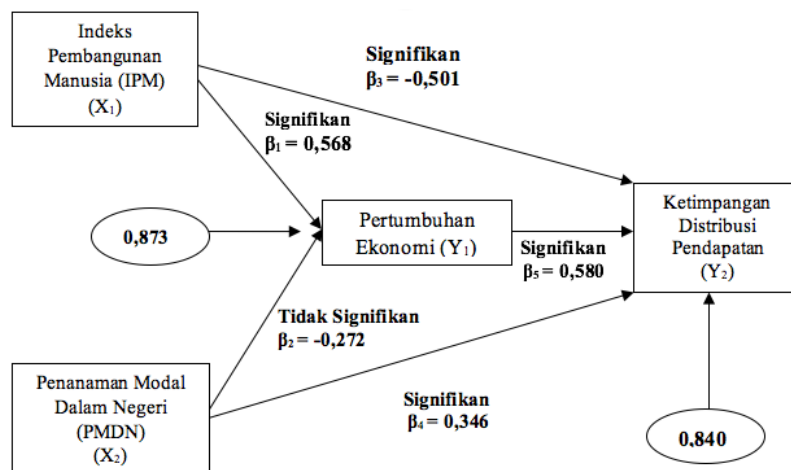
$$e_1 = \sqrt{(1 - R^2)}$$

$$e_1 = \sqrt{(1 - 0,253)} = 0,864$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai e_2 yang menunjukkan variance variabel ketimpangan distribusi pendapatan yang dijelaskan oleh variabel oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan rumus:

$$e_2 = \sqrt{(1 - R^2)}$$

$$e_2 = \sqrt{(1 - 0,301)} = 0,836$$



Gambar 2 Koefisien Jalur Hubungan Antar Variabel

Nilai Koefisien Determinasi Total

Agar dapat mengetahui validitas model, ada indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total dengan hasil sebagai berikut:

$$R^2_m = 1 - (e_1)^2(e_2)^2$$

$$R^2_m = 1 - (0,864)^2(0,836)^2$$

$$R^2_m = 1 - (0,746)(0,698)$$

$$R^2_m = 1 - (0,520)$$

$$R^2_m = 0,48$$

Keterangan:

R^2_m : koefisien determinasi

e_1, e_2 : nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 0,48 atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 4,8 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan 5,2 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengaruh Langsung

1) Pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,573 dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil ini sesuai dengan penelitian Izaah (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) maka pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat.

Hasil penelitian Aris BudiSusanto dan Lucky Rachmawati (2012) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks pembangunan manusia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur derajat perkembangan manusia yakni angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah. Angka harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Peningkatan itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan, dan begitu juga sebaliknya. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas di daerah tersebut.

2) Pengaruh langsung Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar -0,262 dengan nilai signifikansi 0,092 lebih besar dari 0,05 berarti H_0 diterima. Disimpulkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara langsung tidak berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Peningkatan investasi pada PMDN tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai investasi dalam bentuk PMDN kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak merata serta penggunaan investasi PMDN kurang tepat sasaran, sehingga tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menandakan masih kurangnya kepercayaan investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya. Kemudian

ditambah lagi investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) ini tidak banyak menyentuh kelapisan masyarakat artinya investasi yang dilakukan lebih banyak dalam bentuk padat modal yang tidak banyak menggunakan tenaga kerja manusia. Investasi yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bergerak tidak searah, dimana kenaikan investasi diikuti dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Wihda dan Poerwono (2014) yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi hasil penelitian Handayani (2011) menyatakan bahwa PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3) Pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar -0,495 dengan nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Pradnyadewi dan Purbadharmaja (2016) bahwa IPM memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Suatu keadaan yang baik apabila suatu daerah Indeks Pembangunan Manusia-nya meningkat maka akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut. Secara umum IPM yang tidak merata antar daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif

tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah dan ada daerah yang maju akibat kualitas manusianya yang baik. Hal ini akan mendorong tidak seimbang pembangunan yang terjadi.

4) Pengaruh langsung Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (X_2) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,353 dengan nilai signifikansi 0,027 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa PMDN secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ardana (2018) bahwa PMDN berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ini berarti bahwa peningkatan penanaman modal dalam negeri maka ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat. Di daerah yang sedang mengalami perkembangan dan kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan serta permintaan akan meningkatkan penanaman modal dalam negeri sedangkan di daerah lainnya dimana perkembangan sangat lambat maka permintaan terhadap modal untuk investasi juga rendah sebagai akibat penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah.

Pengaruh Tidak Langsung

1) Pengujian Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening dari Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Kota di Provinsi Bali

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dari pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus:

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1^2} + \beta_1^2 S_{\beta_5^2}}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(0,037)^2(0,013)^2 + (0,050)^2(0,009)^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(0,001369 \times 0,000169) + (0,0025 \times 0,000081)}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{0,000000433861}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = 0,0006$$

Berdasarkan perhitungan koefisien $S_{\beta_1\beta_5}$ maka untuk menguji signifikansi variabel *intervening* harus menghitung nilai z dari koefisien $S_{\beta_1\beta_5}$ dengan rumus sebagai berikut.

$$Z = \frac{\beta_1\beta_5}{S_{\beta_1\beta_5}}$$

$$Z = \frac{(0,050)(0,037)}{0,006}$$

$$Z = 3,08$$

Oleh karena nilai Z_{hitung} sebesar $3,08 > 1,96$ hal ini berarti H_0 ditolak, berarti pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening* dari Indeks Pembangunan Manusia (X_1) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

2) Pengujian Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening dari Pengaruh PMDN terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Kota di Provinsi Bali

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening* dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus:

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2^2} + \beta_2^2 S_{\beta_5^2}}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{(0,037)^2 (0,000)^2 + (-6,401)^2 (0,009)^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{(0,001369 \times 0) + (40,972801 \times 0,000081)}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{0,003318796881}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = 0,057$$

Berdasarkan perhitungan koefisien $S_{\beta_2\beta_5}$ maka untuk menguji signifikansi variabel *intervening* harus menghitung nilai z daeri koefisien $S_{\beta_2\beta_5}$ dengan rumus sebagai berikut.

$$Z = \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}}$$

$$Z = \frac{(-6,401)(0,037)}{0,057}$$

$$Z = -0,01$$

Oleh karena Z_{hitung} sebesar $-0,01 < 1,96$ hal ini berarti H_0 diterima, berarti pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel *intervening* Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (X_2) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y_2) kabupaten kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

Table 1.4 Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Antar variabel Penelitian

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung	

X ₁	→	Y ₁	0,568	-	0,568
X ₂	→	Y ₁	-0,226	-	-0,226
X ₁	→	Y ₂	-0,501	0,000035	-0,500
X ₂	→	Y ₂	0,346	-0,00189	0,344
Y ₁	→	Y ₂	0,580	-	0,580

Sumber: *Persamaan Struktural (I) dan (II)*

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung sebagai variabel *intervening* dari variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung bukan sebagai variabel *intervening* dari variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Pemerintah diharapkan mampu mengarahkan pengembangan infrastruktur kepada daerah yang selama ini memiliki PMDN yang rendah, agar alokasi PMDN tidak terpusat pada satu kabupaten/kota. Disamping itu pemerintah diharapkan lebih intensif meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, sarana dan prasarana sehingga suatu daerah dapat mengenali potensi-potensi yang ada di daerahnya itu sendiri dan dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Pemerintah diharapkan mampu mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. Kualitas SDM yang baik akan memperlebar peluang kerja sehingga ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali akan berkurang. Begitu pula dengan PMDN di masing-masing daerah. Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan investasi pada daerah yang unggul saja melainkan seluruh daerah yang ada di kabupaten/kota Provinsi Bali. Investasi dalam negeri yang merata di setiap daerah dapat membantu suatu daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing sehingga ketimpangan distribusi pendapatan dapat ditekan. Pemerintah perlu melakukan pemerataan agar tidak terjadinya ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali harus menyeimbangkan dan memberikan pelatihan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk

masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali agar ketimpangan distribusi pendapatannya dapat dicegah, baik dari segi kualitas SDM dan pemerataan penanaman modal dalam negeri. Pengembangan indikator-indikator tersebut dapat memperlancar pembangunan di masing-masing daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat berkurang.

REFERENSI

- Adipuryanti, N. L. P. Y., & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*. Vol XI(1), hal 20–28.
- Antonescu, Daniela. (2010). *The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration*.
- Aris, B. S., & Lucky, R. (2013). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. Vol 1(3).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2019). *Gini Ratio Kabupaten/kota Provinsi Bali Tahun 2014-2018*. Denpasar: Provinsi Bali.
- _____. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018*. Denpasar: Provinsi Bali.
- _____. *Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018*. Denpasar: Provinsi Bali
- _____. *Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018*. Denpasar: Provinsi Bali.
- Brata, Aloysius Gunadi. (2004). "Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7(2), hal. 113-122.
- Burhan Bungin, Prof. Dr. (2004). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya
- Boediono. (2017). Revisiting the Problem of Development Distribution. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 53(2), hal 211–217. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1373317>.
- Dao, Minh Quang. (2013). Factor Endowment, Human Capital, and Inequality in Developing Countries. *Journal of Economic Studies*, 40(1): h: 98-106. USA:

- Eastern Illinois University.
- Danawati, S., Bendesa, I. K. G., & Utama, M.S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(7): h: 2123-2160.
- Fajrii, M., Delis, A., & Amzar, Y. V. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol(2): 99-107.
- Faturrohmin, Rahmawati. (2011). Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta.
- Gebbert, Kurt, Michael Happich & Andreas Stephan. (2005). Regional Disparities in the European Union: Convergence and Agglomeration. *German Institute of Economic Research*. DIW Berlin.
- Handayani, Tri. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1999-2008. Yogyakarta.
- Hakim, Faikar Zakky. (2018). Analisis Pengaruh Total Populasi, Inflasi, IPM dan Corruption Perception Indeks (CPI) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada Tahun 2010-2015. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta.
- Hanushek, Eric. (2013). Economic growth in developing countries: The role of human capital. Stanford University: *International Journal*.
- Hidayat, M., Sari, L., & Aqualdo, N. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. Vol 2(4), hal 48–63.
- Ikhsan, Arfan. (2008). *Metodelogi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Irawan, Andi. (2015). Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 51(1), hal.148-149.
- Kuncoro, Mudjarat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- _____. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Kurniasih, Erni Panca. (2013). Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet. *Jurnal EKSOS*. Vol 9, hal 36-48.
- Kusuma, Hendra. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9(1): 1-11.
- Khodabakhshi, Akbar. (2011). Relationship between GDP and Human Development Indices in India. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 2, No. 3.
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Makroekonomi: Edisi Kelima*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____. (2006). *Teori Makroekonomi: Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga
- Maskanudin, H., & Wibowo, A. A. (2018). Analysis of Inequality of Economic Development in Districts/Cities Region of Former Kedu Residency in

- Central Java Province. *Eko-Regional Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah*, Vol 13(2), hal 1–9. <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2018.13.2.1174>.
- Mukhlis *et al.*, (2017). Agglomeration of Manufacturing Industrial, Economic Growth, and Interregional Inequality in South Sumatra, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 7(4): 214–224.
- Mustika, Made DwiSetyadhi. (2013). Analisis Disparitas Pendapatan Pedagang Makanan Gerobak Dorong Antar Kecamatan Di Kota Denpasar. *Jurnal Piramida*, Vol. IX No.2: 89 – 94.
- Ndakularak. E., & Setiawan, D. N & Djayastra, I. K. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, ISSN 2337-3067. <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/7619>>. Date accessed: 16 July 2019.
- Niyimbanira, Ferdinand. (2017). Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol 7(4), 254–261.
- Piotr, Bogumil. (2009). *Regional Disparities in Poland*. Ecfm Country Focus. Vol 6(4).
- Pradana, A. N., & Sumarsono, H. (2018). Human Development Index , Capital Expenditure , Fiscal Desentralization to Economic Growth and Income Inequality in East Java Indonesia. *Quantitative Economics Research*, 1(2), 108–118.
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. (2016). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 6(2), hal 115-285.
- Rimbawan, Nyoman Dayuh. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja (Kasus Provinsi Bali, 2001--2011). *Jurnal Piramida*, Vol VIII(2), 76–84.
- Rustariyuni, Surya Dewi. (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *Jurnal Piramida*, Vol 10(1), hal 45–55.
- Sarwendi. (2002). Investasi Asing Langsung Di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, Vol 4(1).
- Sarungu, J. J., & Endah, K. M. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia Tahun 1990-2010: Metode ECM. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol 6(2), 112–117.
- Setiawan, G. B. K. P., & Budiana, D. N. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol 4(10): hal 1276-1303.
- Sudarlan. (2015). Contribution Of Human Development Index On Per Capita

- Income Growth And Poverty Alleviation In Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol 4(8), 173–178.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- _____. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- _____. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- _____. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- _____. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (2005). *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2008). *Makro Ekonomi Teori Terapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (2011). *Mikroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soenandar, Ersi S. (2005). Government Policy in Solving Uneven Regional Developmet between West and East Indonesia: Case Study on KAPET. *Economic journal of Hokkaido University*, Vol 34, hal 171-192. <http://hdl.handle.net/2115/5402>
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja. G., & Sumarto, S. (2012). Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia before and after The Asian Financial Crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*, Vol. 48(2). hal 212. Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2000). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- _____. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga
- _____. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan*. Jakarta : Erlangga
- _____. (2006). *Pembangunan Ekonomi: Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 11. Jakarta: Erlangga.
- Tri Hartini, Nita. (2017). Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Diy Tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol 6(6), hal 62-71.
- UNDP. (2004). "ICT and Human Development: Towards Building a Composite

Index for Asia: Realising the Millinium Development Goals”, *Published for the United Nations Development Programe*, Elsevier.

- Wiagustuni, N.L.P., Mustanda, I.K., Meydianawathi, LG., & Abundanti, N. (2017). Potensi Pengembangan Investasi Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Universitas Udayana*. 10(2): 155-173.
- Wihda, B. M., & Poerwono, D. (2014). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di D.I. Yogyakarta Tahun 1996 – 2012. *Diponegoro Journal of Economics*. Vol 3(1), hal 1.
- Yasa, I. K. O. A., & Arka, S. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Universitas Udayana*. 8(1): 63-71.
- Yeniwati. (2013). Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, Vol 2(3), hal 1-21.
- Yuliani, Tutik. (2015). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur. *Journal of Economics and Policy*. Vol 8(1).